

## **KOMPARASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH**

Oleh:

Reghina Tasya Ambari<sup>1</sup>, Yulkarnain Harahab<sup>2</sup>

### **Intisari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan penetapan Itsbat Nikah serta mengetahui jenis kelahiran anak apa saja yang dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam penerbitan Akta Kelahiran anak.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris. Data penelitian yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder serta data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian ditelaah dan dianalisis secara normatif kualitatif dan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, komparasi penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat dengan menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri dan penetapan Itsbat Nikah dapat dilihat dari segi aturan, prosedur pembuatan, akta kelahiran yang dihasilkan dan implikasi penggunaannya, SPTJM hanya kebijakan afirmatif yang tidak melegalisasi keabsahan perkawinan dibandingkan penetapan Itsbat Nikah. Kedua, jenis kelahiran anak yang dapat menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang tidak dapat menunjukkan akta nikah namun dapat menunjukkan status hubungan perkawinan dalam Kartu Keluarga; anak yang lahir dari Pasangan Suami Istri yang status Perkawinan dalam Kartu Keluarga tercantum "Kawin Belum Tercatat", anak yang lahir dari orang tua yang melangsungkan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun terhadap pemberian SPTJM kepada pasangan yang belum mencatatkan perkawinan karena dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan adalah hal yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) KHI.

*Kata Kunci: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Penetapan Itsbat Nikah, Akta Kelahiran, Perkawinan Tidak Tercatat.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

**COMPARATION OF THE ISSUANCE OF BIRTH CERTIFICATES OF CHILDREN FROM UNRECORDED MARRIAGES USING A STATEMENT OF ABSOLUTE RESPONSIBILITY AND DETERMINATION OF ITSBAT MARRIAGE**

By:

Reghina Tasya Ambari<sup>1</sup>, Yulkarnain Harahab<sup>2</sup>

**Abstract**

This research aims to compare the disclosure of birth certificates for children from unregistered marriages using a Statement of Absolute Responsibility and the determination of the Marriage Certificate and to find out what types of child births can use a Statement of Absolute Responsibility in disclosing a child's birth certificate.

This research is included in empirical normative research. The research data used by the author is secondary data and primary data. The data obtained from the research results were then reviewed and analyzed normatively qualitatively and descriptively qualitatively.

Based on the research that has been carried out, the following conclusions are obtained: First, a comparison of the issuance of birth certificates for children from unregistered marriages using the SPTJM Truth as a Married Couple and the determination of Itsbat Nikah can be seen in terms of the rules, procedures for making them, the birth certificates produced and the implications of their use, SPTJM is only an affirmative policy that does not legalize the validity of a marriage compared to determining its Bat of Marriage. Second, the type of birth of a child that can use the Truth SPTJM as a Husband and Wife Couple is a child born to a husband and wife couple who cannot show a marriage certificate but can show the marital relationship status on the Family Card; children born to husband and wife couples whose marriage status on the family card is listed as "unregistered marriage", children born to parents who entered into a marriage before the existence of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. However, giving SPTJM to couples who have not registered their marriage because it was done before the Marriage Law was implemented is contrary to Article 7 paragraph (3) KHI.

*Keywords: Statement of Absolute Responsibility, Determination of Marriage Certificate, Birth Certificate, Unregistered Marriage.*

---

<sup>1</sup> Student of Master of Law Litigation Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

<sup>2</sup> Lecturer in the Master of Law Litigation Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.